



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 288/KPTS/KP.010/M/3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021 TENTANG NAMA DAN KELAS
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 telah ditetapkan Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, perlu menambah nama dan kelas jabatan fungsional dan pelaksana lingkup Kementerian Pertanian sehingga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 10. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 365) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1141);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021 TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian, diubah sebagai berikut:

1. Menambah Diktum **KELIMA** yang berbunyi sebagai berikut:
KELIMA : Sepanjang nama jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian:
 - (1) sudah tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/KPTS/KP.010/M/6/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian namun tidak diatur dalam Keputusan Menteri ini, tetap menggunakan nama jabatan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor

344/KPTS/KP.010/M/6/2021 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/KPTS/KP.010/M/6/ 2021; atau

(2) belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/KPTS/KP.010/M/6/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian, digunakan nama dan kelas jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

2. Ketentuan Lampiran II huruf A ditambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor XVII (tujuh belas) sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XVII	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	
1	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	12
2	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	10
3	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8

3. Ketentuan Lampiran II huruf B nomor XI (sebelas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XI	AUDITOR	
1	Auditor Ahli Utama	14
2	Auditor Ahli Madya	12
3	Auditor Ahli Muda	10
4	Auditor Ahli Pertama	8
5	Auditor Terampil	6

4. Ketentuan Lampiran II huruf B ditambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor XXXV (tiga puluh lima) sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XXXV	PENERJEMAH	
1	Penerjemah Ahli Madya	11
2	Penerjemah Ahli Muda	9
3	Penerjemah Ahli Pertama	8

5. Ketentuan Lampiran III tentang nama dan jabatan pelaksana lingkup Kementerian Pertanian diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 228/KPTS/KP.010/M/3/2022
TANGGAL : 29 Maret 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
551.1/ KPTS/ KP.010/ M/ 9/ 2021
TENTANG NAMA DAN KELAS
JABATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN.

NAMA DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1.	Analisis Advokasi Hukum	7
2.	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	7
3.	Analisis Data dan Informasi	7
4.	Analisis Dokumen Perizinan	7
5.	Analisis Hasil Penelitian	7
6.	Analisis Iklim	7
7.	Analisis Informasi Publik Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	7
8.	Analisis Investasi Pemerintah	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
9.	Analisis Kelembagaan	7
10.	Analisis Kelembagaan Usaha	7
11.	Analisis Kemitraan	7
12.	Analisis Kerja Sama	7
13.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
14.	Analisis Kimia	7
15.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7
16.	Analisis Lahan Pertanian	7
17.	Analisis Laporan Hasil Audit	7
18.	Analisis Laporan Keuangan	7
19.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	7
20.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
21.	Analisis Organisasi	7
22.	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
23.	Analisis Pembiayaan Pertanian	7
24.	Analisis Pembukaan Lahan	7
25.	Analisis Penataan Jaringan	7
26.	Analisis Pengembangan Kelembagaan Air	7
27.	Analisis Pengembangan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian	7
28.	Analisis Pengendalian Lahan	7
29.	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	7
30.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
31.	Analisis Perbendaharaan	7
32.	Analisis Perencanaan	7
33.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
34.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
35.	Analisis Pestisida	7
36.	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
37.	Analisis Potensi Budidaya Serealia	7
38.	Analisis Potensi Perbenihan	7
39.	Analisis Potensi Sumber Air Tanah	7
40.	Analisis Produk Hukum	7
41.	Analisis Program Diklat	7
42.	Analisis Program Pembangunan Pertanian	7
43.	Analisis Publikasi	7
44.	Analisis Pupuk Anorganik	7
45.	Analisis Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	7
46.	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
47.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	7
48.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
49.	Analisis Sumber Daya Air	7
50.	Analisis Tata Laksana	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
51.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7
52.	Analisis Uji Konsekuensi	7
53.	Fasilitator Kelembagaan Pemasaran	7
54.	Fasilitator Kewirausahaan	7
55.	Fasilitator Promosi	7
56.	Fasilitator Sarana Pemasaran	7
57.	Penata Kebun Percobaan	7
58.	Penata Laboratorium Diseminasi	7
59.	Pengawas Pupuk dan Pestisida	7
60.	Pengelola Alih Teknologi	7
61.	Pengelola Bahan <i>Database</i> Kelembagaan Petani	7
62.	Pengelola Data	7
63.	Pengelola Hak Cipta dan Merk	7
64.	Pengelola Media Cetak	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
65.	Pengelola Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman	7
66.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	7
67.	Pengelola Sampel Pengujian	7
68.	Pengelola Teknologi Pascapanen	7
69.	Pengelola Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	7
70.	Pengelola Teknologi Perbenihan	7
71.	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	7
72.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
73.	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	7
74.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7
75.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Permagangan Internasional	7
76.	Penyusun Evaluasi Diklat Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur	7
77.	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	7
78.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
79.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	7
80.	Penyusun Rencana Kebijakan	7
81.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
82.	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pertanian	7
83.	Penyusun Risalah	7
84.	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	7
85.	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	7
86.	Verifikator Teknis Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman Sumber Daya Genetik	7
87.	Analisis Berita	6
88.	Analisis Keuangan	6
89.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	6
90.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	6
91.	Pemeriksa Teknologi Informasi	6
92.	Penata Laporan Keuangan	6

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
93.	Pengadministrasi Keuangan	6
94.	Pengadministrasi Pengujian	6
95.	Pengadministrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	6
96.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	6
97.	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman	6
98.	Pengelola Akuntansi	6
99.	Pengelola Asrama	6
100.	Pengelola Barang Milik Negara	6
101.	Pengelola Bimbingan Teknis Standardisasi Kompetensi	6
102.	Pengelola Data Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga	6
103.	Pengelola Data Kelembagaan Benih	6
104.	Pengelola Data Penilaian Varietas	6
105.	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6
106.	Pengelola <i>Database</i>	6

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
107.	Pengelola <i>Database</i> Pendidikan	6
108.	Pengelola <i>Database</i> Profesi SDM Pertanian	6
109.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
110.	Pengelola Gudang	6
111.	Pengelola Instalasi Ternak	6
112.	Pengelola Kepegawaian	6
113.	Pengelola Keuangan	6
114.	Pengelola Laboratorium	6
115.	Pengelola Laboratorium Komputer	6
116.	Pengelola Laporan Keuangan	6
117.	Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi	6
118.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6
119.	Pengelola Pameran dan Peragaan	6
120.	Pengelola PNBP	6

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
121.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
122.	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	6
123.	Pengelola Unit Produksi	6
124.	Pengolah Daftar Gaji	6
125.	Pengolah Data	6
126.	Pengolah Data Kelembagaan	6
127.	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6
128.	Penyiap Bahan Instrument Evaluasi Diri, Akreditasi dan Sertifikasi	6
129.	Penyusun Bimbingan Lanjutan, dan Evaluasi Pasca Diklat Pertanian	6
130.	Penyusun Laporan Keuangan	6
131.	Penyusun Promosi dan Kerjasama	6
132.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	6
133.	Sekretaris	6
134.	Verifikator Keuangan	6

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
135.	Bendahara	5
136.	Pemeriksa Kelistrikan	5
137.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5
138.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
139.	Pengadministrasi Pelatihan	5
140.	Pengadministrasi Persuratan	5
141.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5
142.	Pengadministrasi Umum	5
143.	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	5
144.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	5
145.	Pengelola Dokumentasi	5
146.	Pengelola Instalasi	5
147.	Pengelola Instalasi Kebun atau Lahan Praktek dan Screen House	5
148.	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	5

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
149.	Pengelola Layanan Kehumasan	5
150.	Pengelola Limbah	5
151.	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	5
152.	Pengelola Pekarya Kebun	5
153.	Pengelola Perpustakaan	5
154.	Pengelola Peserta Didik	5
155.	Pengelola Peternakan	5
156.	Pengelola Poliklinik	5
157.	Pengendali Teknis Keamanan	5
158.	Penyiap Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga	5
159.	Petugas Protokol	5
160.	Pranata Diklat	5
161.	Pranata Laporan Keuangan	5
162.	Teknisi Gedung atau Bangunan	5

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
163.	Teknisi Laboratorium	5
164.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	5
165.	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	5
166.	Teknisi Mesin	5
167.	Teknisi Produksi	5
168.	Komandan Petugas Keamanan	4
169.	Operator Komunikasi	4
170.	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	4
171.	Pengadministrasi Perizinan	4
172.	Pengelola Bengkel	4
173.	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	4
174.	Pengelola Kandang Hewan Percobaan	4
175.	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	4
176.	Pengolah Data Laporan Keuangan	4

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
177.	Penjaga Asrama	4
178.	Petugas Penggandaan	4
179.	Operator Mesin	3
180.	Pengemudi	3
181.	Perawat Ternak	3
182.	Pramu Kelas	3
183.	Pranata Jamuan	3
184.	Satpam	3
185.	Pemelihara Kebun	2
186.	Pramu Taman	2
187.	Pramu Bakti	1

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




SYAHRUL YASIN LIMPO